

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Lasori, Mawasangka Timur, Buton Tengah)

Indra¹⁾, Anwar Sadat²⁾, Junaid Gazalin³⁾

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Jalan Betoambari No.36, Kota Bau- Bau, Sulawesi Tenggara, 93717 Indonesia

Email : indrusman5@gmail.com¹, nua_nsa@yahoo.com², junaidgazalin@gmail.com³

ABSTRACT

This thesis is the result of research that describes how much influence Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. The purpose of this study was to determine the implementation and impact of the family of hope program in an effort to improve the welfare of the community as well as the supporting and inhibiting factors. The sampling technique used was purposive sampling, with data from 1 village head, 1 Pkh officer and 7 Pkh recipient communities. The data collection method used in this research is triangulation, the data analysis is qualitative. The data analysis technique was carried out by collecting data, reducing data and identifying and categorizing. Where the results of PKH aid receipts with the amount of assistance in the education sector as much as 4,400,000 / year which is accumulated from the elementary education level worth 900,000 / year, junior high school worth 1,500,000 / year and high school worth 2,000,000 / year. Then the amount of assistance in the health sector is 6,000,000/year with details for pregnant women and toddlers each as much as 3,000,000/year. As well as the amount of assistance in the social welfare sector as much as 4,800,000/year consisting of the elderly group worth 2,400,000/year and the disabled group worth 2,400,000/year.

Keywords: Family Hope Program (PKH) and Community Welfare

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang sangat besar dan sangat sulit diatasi dan bersifat mendunia, sehingga kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan penting dalam berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga menegaskan bahwasannya kesejahteraan sosial merupakan suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh suatu lembaga pemerintah maupun swasta guna mencegah, mengatasi atau memberi peran besar terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat.

Setiap daerah pasti memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali daerah Kabupaten Buton Tengah, Buton

Tengah memiliki beberapa masalah, diantaranya dalam bidang sosial ekonomi, khususnya adalah masalah kemiskinan, masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka menghambat tujuan dan cita-cita daerah.

Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti, kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan aspek lainnya, pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Dalam hal ini adalah masalah sosial ekonomi, dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah membuat salah satu program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Di Buton khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) telah ada sejak tahun 2013. Kemudian Kabupaten Buton mekar pada tahun 2014 dan membentuk atau terbagi beberapa Kabupaten salah satunya Kabupaten Buton Tengah yang terdiri dari beberapa Kecamatan, salah satunya Kecamatan Mawasangka Timur. Program Keluarga Harapan atau (PKH) masuk di Kecamatan Mawasangka Timur pada bulan September Tahun 2016 sejak saat itulah dengan adanya program ini masyarakat Mawasangka Timur khususnya Desa Lasori sangat terbantu karena salah satu masalah pokok yang ada di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur

adalah masalah pendidikan dan masalah kesehatan, yang beberapa masyarakatnya sangat minim biaya untuk pendidikan maupun kesehatan, juga penerima yang tidak tepat sasaran seperti sejumlah rumah yang tergolong bagus atau mewah dan tergolong mampu kemudian menjadi penerima PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan merupakan impian dari semua orang. Tidak heran jika setiap Program yang dicanangkan oleh Pemerintah terutama mengenai Program Keluarga harapan banyak sekali antusias masyarakat. Hal ini pula terjadi pada masyarakat di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, yang mana berdasarkan data yang ada dan dikatakan langsung oleh Pendamping Sosial PKH Bapak Poni Alaudin, S.Pd bahwa jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa tersebut adalah sebanyak 152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah yang tidak tepat sasaran berjumlah 6 orang.

Artikel ini mencoba menjelaskan penerapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lasori serta menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Program Keluarga Harapan, keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan suatu target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, artikel ini memilih Desa Lasori kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah sebagai objek penelitian dengan mengambil judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Lasori kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah.

Konsep Implementasi

Menurut (Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2016) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Sedangkan Menurut (Guntur Setiawan, 2011) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif" Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya.

Leo Agustino dalam (Subarsono, A. dkk. 2018) bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut (Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Subarsono, A. dkk 2018) mendefinisikan kebijakan sebagai "Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Menurut (Chief J. O. Udoji dalam Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui keluarga sebagai pondasi awal dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Sejak tahun 2007 diimplementasikan mendapatkan aspirasi positif dari berbagai kalangan. Namun hingga saat ini penurunan angka kemiskinan tetap menghasilkan indikator angka penurunan kemiskinan yang rendah dan proses graduasi mandiri peserta PKH yang masih rendah yang mengisyaratkan bahwa program ini hanya jalan ditempat. Berdasarkan fenomena ini, penelitian disajikan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana implementasi PKH di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah dalam mengentaskan kemiskinan.

Salah satu masalah utama pembangunan di Indonesia saat ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang

perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah PKH yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Lasori adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat RTSM di Desa tersebut yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain kata proses implementasi yang merupakan sejauh mana PKH melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai semua sarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PKH di Desa Lasori. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH di Desa Lasori ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak RTSM, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan.

Program keluarga harapan (PKH) adalah arah pengentasan kemiskinan melalui PKH sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

yang menyatakan “Perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang dari masyarakat itu sendiri yang menjadi kokoh untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat yang mandiri melalui pengentasan kemiskinan agar masyarakat mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat sehingga benar-benar mampu menjadi masyarakat yang sehat dan cerdas sehingga mereka keluar dari kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk mengurangi beban mereka melalui Bantuan Langsung Tunai Bersyarat, dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek bertujuan untuk membantu pengeluaran KPM dengan bantuan uang tunai, sedangkan sasaran jangka panjang bertujuan mempersiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Lasori kecamatan Mawasangka Timur kabupaten Buton Tengah, terdapat personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).

Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari Pemerintah. Pendamping PKH juga memiliki tugas pokok antar alain validasi, pertemuan Kesejahteraan merupakan impian setiap individu. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata “Kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus 1991) berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, dan makmur, sedangkan pengertian dari

kesejahteraan itu sendiri adalah hal atau keadaan aman, dan makmur. Kesejahteraan dikaitkan dengan berbagai macam dan dilihat bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu cepat dan tepat.

Konsep Kesejahteraan

Dari berbagai sudut pandang tertentu, salah satu contohnya adalah Kesejahteraan Sosial, secara harfiah, kesejahteraan sosial mengandung arti yang sangat luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwodarminto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur selamanya, juga Kesejahteraan adalah tolak ukur perkembangan suatu bangsa. Tingkat kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang perlu diperhatikan.

Adapun kesejahteraan memiliki beberapa tahapan-tahapan sebagaimana yang dirumuskan teori need milik Abraham Maslow bahwa kesejahteraan memiliki beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama, kebutuhan fisik terpenuhi (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua, kebutuhan akan rasa aman yang terpenuhi (*safety needs*). Selanjutnya tahap ketiga, terpenuhinya kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat, terpenuhinya kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap kelima,

kebutuhan aktualisasi diri yang terpenuhi (*self actualization needs*).

II. METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini memakai metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas, atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah bukan eksperimental.

III. PEMBAHASAN

Implementasi PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lasori

Dalam implementasinya, pelaksanaan sebuah kebijakan adalah perencanaan yang dipraktikkan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini juga dilakukan agar tujuan dari sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik maka harus digunakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti : sekolah, balai desa, serta Puskesmas sebagai penunjang. Pelaksanaan PKH ini dilaksanakan untuk memenuhi tujuan yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Tabel 1. Jumlah Dana Bantuan Masyarakat Penerima Bantuan PKH Desa Lasori

Berdasarkan tabel diatas jumlah bantuan pada bidang pendidikan sebanyak 4.400.000/tahun yang diakumulasikan dari tingkat pendidikan SD senilai 900.000/tahun, SMP senilai 1.500.000/tahun dan SMA senilai 2.000.000/tahun. Kemudian jumlah bantuan pada bidang kesehatan senilai 6.000.000/tahun dengan rincian ibu hamil dan Balita masing-masing sebanyak 3.000.000/tahun. Serta jumlah bantuan pada bidang kesejahteraan sosial sebanyak 4.800.000/tahun yang terdiri dari kelompok lanjut usia senilai 2.400.000/tahun dan kelompok disabilitas senilai 2.400.000/tahun.

Penerimaan bantuan PKH desa

No	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Pendidikan :	4.400.000/tahun
	a. SD	900.000/tahun
	b. SMP	1.500.000/tahun
	c. SMA	2.000.000/tahun
2	Kesehatan :	6.000.000/tahun
	a. Ibu hamil	3.000.000/tahun
	b. Balita	3.000.000/tahun
3	Kesejahteraan sosial :	4.800.000/tahun
	Lanjut Usia	2.400.000/tahun
	Disabilitas	2.400.000/tahun

Lasori dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap dalam kurun waktu satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sebelum dilaksanakan penyaluran bantuan, pendamping PKH telah melakukan survei dan evaluasi bagi para calon penerima bantuan PKH agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Adanya evaluasi,

untuk memberikan penilaian kepada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan adanya evaluasi kebijakan. Di Desa Lasori ada permasalahan yang belum dievaluasi yaitu mengenai penerimaan bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.

Peenelitian ini dilaksanakan di Desa Lasori kecamatan Mawasangka Timur kabupaten Buton Tengah, dan bertemu dengan petugas PKH serta beberapa Narasumber. Pada proses penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa, yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan hasil utama dari penelitian kualitatif dan kemudian dipahami dan dipelajari situasi tersebut.

Selama masa penelitian, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula, apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana tingkah laku berlangsung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Observasi
 Pada penelitian ini penulis mengamati langsung terhadap Lembaga tersebut, dan mendatangi kediaman peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Wawancara
 Penulis menggunakan Teknik wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Teknik terstruktur digunakan kepada pegawai kantor Kelurahan dengan pengawas yaitu pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan teknik semi terstruktur digunakan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Studi Kepustakaan (Dokumentasi)
 Studi Kepustakaan peneliti lakukan dengan mencari data pendukung (data

skunder) pada berbagai literatur baik, berupa: buku, dokumen, makalah hasil penelitian serta bahan-bahan refrensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian diperoleh jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebanyak 152 namun didalamnya terdapat 6 (enam) KPM yang tidak tepat sasaran. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, akan tetapi bantuan tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat, bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Lasori belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Faktor Pendukung

1. Komunikasi

Komunikasi antara Pendamping dan Peserta PKH telah terjalin dengan baik. Komunikasi tersebut telah memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang merupakan syarat wajib bagi Peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai Peserta PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh peserta PKH Dinas selalu melakukan komunikasi dan PKH dapat memberikan manfaat bagi Peserta PKH untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Sumber daya manusia di desa lasori telah memadai. Sumber Daya

manusia yang memadai merupakan sarana pendukung bagi Peserta PKH. jadi, ketika peserta PKH diberikan bantuan pengolahan dana bantuan dan penyuluhan pengembangan keahlian yang kemudian disampaikan oleh Pendamping PKH mendorong potensi keahlian Peserta PKH ini bisa dikembangkan dan PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengentaskan kemiskinan.

3. Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa

Struktur birokrasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa telah mendukung implementasi PKH. Kepala Desa telah mampu mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, untuk mensukseskan PKH. Telah dilakukan berkoordinasi dengan Pendamping PKH dalam melaksanakan dan pembinaan kepada Peserta PKH baik mengenai syarat dan ketentuan yang ditentukan, termasuk ancaman akan sanksi dan pinalti kepada Peserta PKH yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut.

4. Disposisi

Disposisi Penerima PKH walaupun sudah dapat bantuan, namun masih diberikan pendampingan. Dinas tetap memberikan pembinaan kepada penerima PKH dalam pengelolaan bantuan, sehingga dapat berjalan terus. Selain itu juga adanya dukungan dari Pemerintahan Desa Lasori melalui Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah yang berupa memberi uang bensin dan uang jajan bagi pendamping PKH. Dinas Sosial

Kabupaten Buton Tengah juga mengikutsertakan pendamping dalam kegiatan seminar dan matrikulasi hal ini bertujuan agar menjadikan pendamping lebih professional, sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terus berkembang sampai saat ini.

Faktor Penghambat

1. Watak dan Sikap

Watak dan sikap yang kurang tanggungjawab dari Peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh Pendamping PKH. Akibatnya menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari Peserta PKH, sehingga pencairan dana ke rekening Peserta PKH tidak tepat waktu.

2. Data

Data di lapangan masih ditemukan adanya data Peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Peserta PKH. Pada sisi yang lain ketika verifikasi oleh Pendamping PKH ditemukan biodata nama tertentu di masyarakat yang kondisinya sangat miskin, dan sangat layak sebagai Penerima PKH, namun orang yang bersangkutan tidak terdaftar di data Kementerian Sosial, maka orang tersebut tidak berhak menerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil penelitian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan bantuan PKH desa Lasori dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam kurun waktu satu tahun yaitu setiap 3 bulan sekali. Dengan Jumlah bantuan pada bidang pendidikan sebanyak 4.400.000/tahun yang diakumulasikan dari tingkat pendidikan SD senilai 900.000/tahun, SMP senilai 1.500.000/tahun dan SMA senilai 2.000.000/tahun. Kemudian jumlah bantuan pada bidang kesehatan senilai 6.000.000/tahun dengan rincian ibu hamil dan Balita masing-masing sebanyak 3.000.000/tahun. Serta jumlah bantuan pada bidang kesejahteraan sosial sebanyak 4.800.000/tahun yang terdiri dari kelompok lanjut usia senilai 2.400.000/ tahun dan kelompok disabilitas senilai 2.400.000/tahun.
2. Komunikasi antara Pendamping dan Peserta PKH telah terjalin dengan baik serta Struktur birokrasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa telah mendukung implementasi PKH. Selain itu juga adanya dukungan dari Pemerintahan Desa Lasori melalui Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah yang berupa memberi uang bensin dan uang jajan bagi pendamping PKH. Watak dan sikap yang kurang tanggungjawab dari Peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh Pendamping PKH. Akibatnya menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari Peserta PKH, sehingga pencairan dana ke rekening Peserta PKH tidak tepat waktu. Data di lapangan juga masih ditemukan adanya data Peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima

PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisanjaya, Syahputra Suleman dan Risna Resnawaty.2019 “*Program Keluarga Harapan (PKH) : Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*” Vol. IV, No. 1: 88, - 31 Januari,
- Amirullah. (2015). Populasi Dan Sampel (pemahaman, jenis dan teknik). *Wood Science and Technology*, 16(4), 293–303.
- Bayu Prakoso, Albertus. 2016. *Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto*. Surabaya :Vol 04 No 1,
- Daud, M., & Marini, Y. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38.
- Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “*mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial*”.
- Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “*implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.*”
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2016. *Implementasi Kebijakan Publik: Tindakan untuk mencapai suatu tujuan*, Yogyakarta:Y.A.P
- Masyarakat, K., & Kota, K. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*. 140–153.
- Ningtyas, M. (20014). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojonegoro*.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Rahayu et al. 2014. “*Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program pemberian uang tunai RTSM berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan kewajibannya.*”. Vol. 1 Nomor. 2.
- Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan, “*implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai*

*dari manajemen puncak sampai
pada karyawan terbawah”*

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. PT Refika Aditama. Bandung.

Septiana, 2012. *“Kesejahteraan Sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan 4 pemberantasan keburukan sosial tentu saja jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.. Universitas Diponegoro”*: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Shannon, Claude E. And Warren Weaver. 1949. *The Mathematical Theory Of Communication*. Urbana : University Of Illinois.

Suwatno dan Priansa, D. 2011. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Tarmizi (2017), Marketing as Exchange, *The Journal of Marketing*, 39 (4), pp.32-39

Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa